**PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP PASAL 480
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MENGENAI PENADAHAN**

Oleh

Desmawaty Romli¹⁾, Junaidi²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti

Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Kota Palembang

Email: [2junaidievy@yahoo.com](mailto:junaidievy@yahoo.com)

Abstract

The criminal act of detention as regulated in Article 480 of the Criminal Code, in which the detention element in the article is very easy to ensnare anyone who receives the proceeds of crime with an intentional element (*dolus*), which means that the perpetrator of the detention can be deemed appropriate must be can suspect the origin of goods from crime and it is difficult to prove that the collector really knows about it (the origin of the goods) As for the relationship with consumer protection related to this case, it can be seen in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which describes consumer rights. Detention based on Article 480 of the Criminal Code is combined between deliberate offense (knowing) that an item originates from a crime and an offense of negligence (*culpa*) marked with the words "should be able to know" that item comes from crime. Element intentional or *culpa* This is alternatively mentioned against other elements, namely that the goods were obtained by crime. It is not necessary that the perpetrators of custody know or should be able to suspect with what crime the goods were obtained, namely whether by theft, or embezzlement, or extortion, or threats, or fraud. Consumer protection is carried out to provide protection to consumers from deceptive and misleading business practices and to provide access to information disclosure, and to ensure legal certainty, especially regarding consumer rights as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Ordering of Goods, Consumer Rights, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana [1]. Masalah pidana yang paling sering terjadi dalam

masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan [2]. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus

menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum [3].

Dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan [4].

Oleh karena, informasi merupakan hal terpenting untuk konsumen yang menggunakan dan memanfaatkan barang atau jasa dari pelaku usaha. Informasi yang diterima dapat diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya konsumen tidak diugikan baik secara materiil ataupun immaterial [5]. Adapun dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen mengenai statusnya sebagai pembeli atau konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa, sehingga apabila terjadi transaksi jual-beli, gadai, atau lainnya yang mana orang yang membeli atau menerima gadai barang hasil dari kejahatan, sedangkan penerima tersebut benar-benar tidak mengetahuinya dan juga barang tersebut tidak patut diduga hasil dari kejahatan karena mungkin penjual atau orang yang menggadaikan barang tersebut memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya, maka penerima barang tersebut tidak dapat dianggap sebagai penadah, tetapi lebih tepat dianggap sebagai korban dengan statusnya sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan [6].

LANDASAN TEORI

Penadahan

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan [7].

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu [8].

Pengertian penadahan menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya

pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”[9].

Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni terdapat dalam Pasal 1, butir 2 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk idup lain dan tidak untuk diperdagangkan[10].

Penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Dalam kepastiaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara, Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen

antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada pengertian konsumen pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas luasnya kepada konsumen [11].

Menurut AZ. Nasution dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar" menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau

rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial) [12].

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan

- memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:
- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan [13]. Jenis penelitian diterapkan adalah penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif [14]. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani [14].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Penadahan berdasarkan bentuk dan berat ringannya dapat dibedakan sebagai berikut[16] :

a. *Penadahan Biasa*

Tindak pidana penadahan ini berkaitan erat dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

b. *Penadahan sebagai Kebiasaan*

Penadahan ini diatur dalam Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- 1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- 2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

c. *Penadahan Ringan*

Jenis penadahan ini diatur pada Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur yang disyaratkan oleh undang-undang, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus dapat membuktikan di depan persidangan bahwa terdakwa:

- a. Menghendaki untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, dan harus merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan;
- b. Mengetahui tentang keadaan benda-benda yang ia beli, tukar, dan lain-lainnya itu sebagai benda-benda yang diperoleh karena kejahatan[17].

Berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal ini membuktikan bahwa penadahan termasuk tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan

bukanlah unsur yang menentukan. Hal ini dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan[18]”.

Untuk melaksanakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 tetap wajib mengacu pada unsur tindak pidana penadahan yang ada, yaitu harus dianggap tahu dan patut menduga barang hasil kejahatan tersebut. Tetapi meskipun dalam unsur pasal tersebut disyaratkan harus mengetahui bahwa barang yang diperoleh itu hasil kejahatan tetap sulit untuk dibedakan. Salah satu contoh jika barang hasil kejahatan itu dijual di tempat umum, harga sebagaimana mestinya (harga pasaran), dan dengan cara lain yang tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Padahal barang tersebut hasil dari sebuah kejahatan[19].

Dari penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama

dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui. Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[20].

2. Hak-hak Konsumen yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Nurmardjito, bahwa pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan[21] :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas produk barang dan pelayan jasa;

- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Menurut Sidharta, ada 4 (empat) hak-hak konsumen, yaitu[22] :

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to Safety*)
Konsumen di dalam memanfaatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa terhadap produk yang dari pelaku usaha harus mendapatkan rasa

keamanan, sehingga tidak membahayakan jika dikonsumsi dan konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani terhadap barang atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha.

- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*)

Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus diberitahukan atau diinformasikan kepada konsumen baik secara lisan ataupun melalui iklan dan mencantumkan keterangan dalam kemasan produk (barang). Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan informasi kepada konsumen terhadap produk barang atau jasa yang dipasarkan.

- 3) Hak untuk memilih (*The Right to Choose*)

Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang digunakannya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

- 4) Hak untuk didengar (*The Right to be Heard*)

Hak ini berhubungan dengan hak untuk mendapatkan informasi jelas dan akurat, karena informasi yang diberikan terkadang tidak memberikan kepuasan kepada konsumen.

Upaya perlindungan konsumen merupakan menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa :

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan hukum kepada konsumen

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam implementasi pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut perlu ditinjau ulang, terutama mengenai beberapa unsur didalamnya yang menjadi dasar hukum seseorang dapat dikategorikan sebagai penadah. Agar konsumen dapat terlindungi dalam melakukan haknya yaitu jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [2] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- [3] Lamintang, 2019, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doule Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Informasi Produk Import*, Jurnal Analogi Hukum, 1(1).
- [6] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- [7] Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [8] Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [9] <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalahpe- mbuktian-tindakpidana- penadahan>.
- [10] Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [11] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- [12] Az. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- [13] Wiryono Surachmand, 1991, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsio.
- [14] Jhoni Ibrahim, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media.
- [15] Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-4, Jakarta : Kencana Pradana Media Grup,
- [16] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.

-
- [17] Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- [18] M. Kholil, 2018, *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1).
- [19] M. Kholil, 2018, *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1).
- [20] P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- [21] Husni Syawali dan Neni Imayanti, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- [22] Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi Revisi*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.